

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi karena sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi perusahaan untuk melakukan persaingan di era globalisasi, dimana salah satu ciri-cirinya adalah aliran informasi yang mampu menyebar dengan sangat cepat tanpa menghiraukan lagi garis-garis batas antar negara. “Makin pesatnya perkembangan TI dewasa ini, membuat banyak organisasi dan perusahaan berusaha mengadopsi TI terbaru untuk membantu kelancaran bisnis. TI tidak lagi dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi salah satu penentu atas terlaksananya sasaran atau strategi bisnis perusahaan. Dukungan TI terhadap bisnis lazimnya diwujudkan dalam sekumpulan sistem yang terdiri atas sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya”. (Falahah, 2007).

Sistem informasi berbasis teknologi informasi (SI/TI) sudah dianggap sebagai sumber daya organisasi yang mendukung operasional proses bisnis, penyajian informasi maupun pengambilan keputusan. Organisasi atau pemerintahan saat ini menggunakan sistem informasi yang dipercaya sebagai upaya strategis organisasi dalam meningkatkan keunggulan dan pengelolaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang baik akan menunjang keberhasilan organisasi untuk memperoleh keunggulan yang lebih kompetitif. Begitu pula pemanfaatan sistem informasi pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang

dipercaya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kaitannya dengan tata kelola sistem informasi.

Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menyediakan informasi dengan cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan strategis, selain itu diharapkan juga untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Penggunaan Sistem dan Teknologi Informasi (SI/TI) mempunyai peran yang sangat penting bagi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengelolaan Penyerapan Anggaran Daerah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memakai 2 sistem, yaitu E-Budgeting dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). E-Budgeting adalah sistem informasi yang mempunyai fungsi untuk mengelola Anggaran dan Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, sedangkan SIPKD adalah sistem informasi yang mempunyai fungsi untuk penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedua sistem tersebut saat ini berjalan cukup baik tetapi terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja terkait dengan penyerapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Salah satu tujuan diterapkannya E-Budgeting adalah untuk transparansi informasi kepada stakeholder, akan tetapi terdapat permasalahan perbedaan harga barang antara sistem E-Budgeting dengan realisasinya, sehingga ketika ada perubahan harga yang dilakukan, membutuhkan proses yang cukup lama untuk penyerapan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran, seperti yang

ditunjukkan pada gambar grafik 1.1. Dengan semakin lamanya proses perubahan harga dan penyerapan anggaran maka akan memperlambat dan menghambat kinerja Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 1. 1 Grafik Keterlambatan Penyerapan APBD Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

(sumber: hasil analisa penulis, 2017)

Melihat pentingnya peran dari sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta saat ini maka pemahaman responden akan sangat penting agar penyerapan anggaran APBD menjadi lebih efektif dan efisien. Maka dari itu menurut penulis langkah awal yang paling dapat dilakukan adalah melakukan audit terhadap SI/TI yang ada pada saat ini dengan menggunakan domain COBIT (Control Objective for Information and Related Technology).

Dalam penulisan ini nanti akan dilihat bagaimana pengaruh SI/TI Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta terhadap pemahaman responden dengan

menggunakan domain COBIT. Dengan melakukan analisis tersebut maka akan ditemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi terhadap pemahaman responden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka studi ini mengangkat rumusan masalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi terhadap pemahaman responden dan rekomendasi apa saja yang dapat diberikan pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi sistem informasi terhadap pemahaman responden dan memberikan rekomendasi agar penyerapan APBD Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan *Case Study* ini dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan di bidang SI/TI.
2. Bagi penulis manfaat yang dapat diambil adalah menambah wawasan tentang SI/TI khususnya pengaruh SI/TI pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta terhadap pemahaman responden serta pemahaman tentang domain COBIT.

3. Memberi saran dan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan dan pengembangan sistem informasi.
4. Bagi Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta *Case Study* ini diharapkan dapat membantu kinerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik sehingga kendala dan hambatan yang ada saat ini menjadi jelas dan menjadi salah satu bahan pertimbangan mengambil kebijakan bagi para pimpinan untuk pengembangan dan perbaikan SI/TI.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dibatasi dengan tujuan agar pembahasan tidak terlalu menyimpang. Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi yang dianalisis adalah sistem yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, yaitu e-budgeting dan SIPKD.
2. Metode analisis sistem informasi menggunakan domain COBIT